BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Konfigurasi politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen menunjukkan adanya penguatan kewenangan DPR melalui hak budget dan kemandirian penyusunan anggaran internal yang secara hukum sah. Namun, DPR berada pada posisi yang sekaligus menentukan, membahas, dan menyetujui anggaran yang berkaitan dengan kepentingan kelembagaannya sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan mekanisme checks and balances. Kondisi ini menunjukkan bahwa politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki pengelolaan APBN secara terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2. Kendala politik hukum pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dalam mewujudkan sistem hukum keuangan negara berbasis negara kesejahteraan terletak pada lemahnya pengendalian berbasis kinerja, tingginya konflik kepentingan struktural, minimnya transparansi dan akuntabilitas, serta kuatnya budaya politik transaksional yang mendorong orientasi anggaran lebih berpihak pada kepentingan elite politik daripada kepentingan publik. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan anggaran

remunerasi parlemen belum sepenuhnya selaras dengan tujuan dari negara kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

3. Upaya mengatasi kendala pengelolaan anggaran remunerasi parlemen dilakukan melalui rekonstruksi politik hukum yang menempatkan APBN sebagai instrumen negara kesejahteraan, dengan membangun sistem penganggaran yang transparan, akuntabel, berbasis kinerja, serta memperkuat pengawasan dan partisipasi publik. Rekonstruksi tersebut juga harus didukung pembentukan undang-undang baru mengenai hak keuangan pejabat negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025, yang berlandaskan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan, akuntabilitas, dan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga pengelolaan anggaran parlemen selaras dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dengan membentuk undang-undang baru mengenai hak keuangan dan administratif pejabat negara yang berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. DPR perlu mereformasi tata kelola anggaran remunerasi parlemen dengan memperkuat transparansi, pengawasan eksternal, dan pengukuran kinerja

berbasis *outcome* agar setiap penggunaan anggaran benar-benar selaras dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat.

3. Perlu dibentuk lembaga independen berupa *Remuneration Tribunal* atau *Independent Remuneration Authority* yang berwenang melakukan kajian, evaluasi, dan penetapan standar remunerasi pejabat negara, termasuk anggota DPR, guna mencegah konflik kepentingan, memperkuat disiplin fiskal, serta memastikan bahwa setiap peningkatan hak keuangan didasarkan pada kinerja, kebutuhan objektif, dan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Aburaera, Sukarno, Muhadar, dan Maskun, 2013, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta.

Andri, Alsar dan Mhd. Himsar Siregar, 2021, *Keuangan Negara & Daerah, Dilengkapi dengan Pembahasan Dalam Islam*, Rajawali Pers, Depok.

Anggara, Sahya, 2016, *Administrasi Keuangan Negara*, Pustaka Setia, Bandung.

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Depok.

Asshiddiqie, Jimly dan Ali Safa'at, 2021, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiartha, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang.

Brouwer, G. dan Schilder, 1998, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aeguilibri, Nijmegen.

Chand, Hari, 1994, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Services, Kuala Lumpur.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran, 2013, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*, Kementerian Keuangan, Jakarta.

Gazali, 2022, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, Sanabil, Mataram.

Hadiyanto, 2022, *Hukum Keuangan Negara: dalam Teori dan Praktik*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Hadjon, Philipus M., 2012, *Kebutuhan akan Hukum Administrasi Umum dalam Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2011, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filasafat dan Metode Tafsir*, UB Press, Malang.

Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, 2022, *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Hartati, 2018, *Menatap Masa Depan Dewan Perwakilan Daerah*, Trisar Mitra Utama, Jambi.

HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Isra, Saldi, 2020, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, RajaGrafindo Persada, Depok.

Kelsen, Hans, 1973, *General Theory of Law and State* (Terj. Anders Wedberg), Russell & Russell, New York.

Kerlinger, Fred N., 2006, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Legowo, A., 2008, "Keterwakilan Politik dan Tipe Parlemen dalam Perspektif Teoritis dan Sejarah", dalam *Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta.

Manan, Bagir, 2004, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.

MD, Moh. Mahfud, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O. S. Hiariej, 2023, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas, Dan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok.

Mochtar, Zainal Arifin, 2022, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, Buku Mojok Grub, Yogyakarta.

Mulkan, Hasanal dan Serlika Aprita, 2023, *Hukum Keuangan Negara*, Mitra Wacana Media, Bogor.

Munaf, Yusri, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Riau.

Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Elvaretta Buana, Tasikmalaya.

Nasir, Muh., 2025, *Politik Hukum*, Manggu Makmur Tanjung Lestarari, Bandung.

Palguna, I Dewa Gede, 2020, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan*, Rajawali Pers, Depok.

Petring, Alexander, dkk., 2013, *Negara Kesejahteraan dan Sosial Demokrasi*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta.

Putra, Diki Okta Dwi, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Kewenangan APIP dalam Pengelolaan Keuangan Negara*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta.

Radjab, Syamsuddin, 2013, *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Nagamedia, Jakarta Timur.

Rhiti, Hyronimus, 2011, *Filsafat Hukum (dari klasik sampai postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Riwanto, Agus, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahtraan Indonesia Pasca Reformasi*, Oase Pustaka, Sukoharjo.

Rumasukun, Mohamad Ridwan, dkk., 2020, *Keuangan Negara & Daerah*, Madena Tera, Medan.

Setiyono, Budi, 2018, *Model dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, Undip Press, Semarang.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2020, *Sistem Hukum Indonesia: Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Solikin, H. Nur, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Sudiro, Amad, Mella Ismelina Farma Rahayu, Markoni, dan Willy Arafah, 2025, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif untuk Penulisan Akademis dan Praktis*, Diva Pustaka, Purbalingga.

Suhartini, Endeh, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Hartiwiningsih, 2022, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, Rajawali Buana Pusaka, Depok.

Supardan, Herry, 2020, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, Media Nusa Creative, Malang.

Susanto, Mei, 2013, *Hak Budget Parlemen di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafa'at, Muchammad Ali, 2010, *Parlemen Bikameral, Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.

Syarif, Muhammad, dkk., 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Sumatera Barat.

Tim Hukum Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya, Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Bekerjasama dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2023, *Hukum Keuangan Negara: Pengertian, Ruang Lingkup, Pengelolaan, dan Penyelesaian Kerugian Negara*, Kanisus, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2025, *Hukum Keuangan Negara dalam Mengatasi Keadaan Darurat: Perspektif Hukum Keuangan Negara dalam Penanganan Kondisi Krisis Ekonomi pada Tahun 1998, 2008, dan 2020*, Istana Agency, Yogyakarta.

Ujianto, H., dkk., 2017, *Keuangan Negara*, Indomedia Pustaka, Yogyakarta.

Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

Yuhelson, H., 2018, *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

JURNAL :

Adawiyah, R., et al. (2025). *Pengaruh Partisipasi Publik Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah di Era Digitalisasi: Studi Literatur Dengan Pendekatan Kualitatif Deskriptif*. MUSYTARI: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 21(8). https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/4249/3644

Adlhiyati, Z., dan Achmad. (2019). *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. Undang: Jurnal Hukum, 2(2), 409-431. https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431

Alexander, L. (2018). *Law and Politics: What Is Their Relation?*. Harvard Journal of Law and Public Policy, 41(1), 355-368. https://journals.law.harvard.edu/jlpp/wp-content/uploads/sites/90/2018/01/Alexander_FINAL.pdf

Alfaniza, H., Mumtazinur, dan Z. Pasha. (2023). *Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pemberian Dana Pensiun bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara*. As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara, 2(2), 38. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/view/3198

Bachtiar. (2021). *Peran Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan di Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa*. Journal of Government Insight, 1(2), 104-111. https://doi.org/10.47030/jgi.v1i2.313

Bimasakti, M. A. (2024). *Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Proceeding APHTN-HAN), 2(1), 187-208. https://doi.org/10.55292/6fgdqt22

Breukel, J., et al. (2017). *Independence of Parliament*. Research Paper (Parliamentary Library & Information Service Department of Parliamentary Services Parliament of Victoria), 3, 1-76. https://apo.org.au/node/90326

Darmawan, A. (2014). *Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 114-138. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.281

Faisal, H. (2025). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bappenas Working Papers, 8(3), 460-484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

Fatimah, M. (2023). *Hubungan Politik Hukum dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2023, 56-62. https://proceedings.ums.ac.id/pdih/article/view/3339

Hadiyono, V. (2020). *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, 1(1), 23-33. https://repository.unika.ac.id/21846/

Hadjon, P. M. (1994). *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*. Yuridika, 8(1). https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5762

Hakim, S. A., M. M. Habibi, dan Sudirman. (2016). *Implementasi Kebijakan Remunerasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(3), 65-73. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.03.9

Hananto, V. A. (2025). *Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32(1), 72-98. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4

Hernawan, A. (2014). *Industrial Relations in the Perspective of Justice Theory by John Rawls*. Mimbar Hukum, 26(2), 275-288. https://doi.org/10.22146/jmh.16042

Julpikar. (2016). *Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penetapan dan Pengawasan APBN di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 162-183. https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/download/786/721

Khairina, K., dan Afrizal. (2024). *Sistem Remunerasi*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(1), 3532-3540. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12944

Libra, R., dan M. Fauzan. (2023). *Penerapan Konsep Welfare State Dalam Memprioritaskan Pelayanan dibidang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Riau*. Jurnal Esensi Hukum, 5(1). https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i1.225

Lismanto, L., dan Y. J. Utama. (2020). *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433

Putra, I. G. A. H. A., I. W. Bagia, dan N. L. W. S. Telagawati. (2019). *Dampak Remunerasi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan*. e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, 7. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/view/38398

Putra, M. D. (2021). *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila*. LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, 23(2). https://media.neliti.com/media/publications/501075-none-432e7d02.pdf

Rishan, I., & Mochtar, Z. A. (2025). *Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya Pasca Reformasi*. Mimbar Hukum, 37(1), 233-261. https://doi.org/10.22146/mh.v37i1.20145

Rusdian, A. F. (2025). *Fungsi DPR Dalam Sistem Checks and Balances: Pendekatan Sosiologi Hukum Emile Durkheim*. Jurnal Hukum Caraka Justitia, 5(2). https://doi.org/10.30588/jhcj.v5i2.2186

Rusnan. (2014). *Konsep Negara Hukum Dalam Hubungan Kekuasaan Freiss Ermerssen Dalam Welfare State*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2(4), 1-10. https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/153/129

Subekti, T., B. Supriyatno, dan A. Hakim. (2025). *Partisipasi Publik Dalam Proses Anggaran Pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia*. PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8(1). https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257

Suharto, E. (2006). *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?*. Makalah Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia. IRE Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta. http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/UGMWelfareState.pdf

Sujana, I. G. (2024). *Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945*. IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, 2(1). https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i1.41

Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*. Jurnal Sospol, 2(1). DOI:10.22219/sospol.v2i1.4759

Susanto, Mei. (2016). *Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law): Vol. 3: No. 1, Article 9. https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a4

Susanto, Mei. (2018). *The Legislative Role in The Budgeting Process in Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum (Negara Hukum), 9(2). https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.954

Susanto, S. N. (2020). *Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. Administrative Law & Governance Journal*, 3(3). https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530

Wasti, R. M. (2015). *Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 45(1). https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/4/

Widayati. (2015). *Sistem Parlemen Berdasarkan Konstitusi Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 44(4). DOI: https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.415-424

Zamroni, M. (2024). *Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata*. Mimbar Hukum, 36(2). https://doi.org/10.22146/mh.v36i2.13000

TESIS :

Charles-Alexandre Fleury, 2025, *Peningkatan Wewenang Anggaran Parlemen Eropa: Implikasi dalam Negosiasi Kerangka Keuangan Multitahunan (MAFF)*, Tesis, Universitas Padua Italia.

Michael J. Britton, 2005, *Pencarian formula: gaji anggota parlemen di Australia Barat*, Tesis, Universitas Edith Cowan Australia.

Roberia, 2009, *Analisis Yuridis Perbaikan Sistem Remunerasi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia.

Yayat Suhartono, 2008, *Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan Politik Masyarakat dalam Pemilu di Provinsi Banten (Studi Terhadap Implementasi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD)*, Tesis, Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta.

Yuni Kartika, 2021, *Lembaga Legislatif Republik Indonesia dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)*, Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

WEBSITE/INTERNET :

17+8 Tuntutan Rakyat. *17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati*. https://tuntutanrakyat.space/. Diakses 06 Juni 2026.

Andriyani, Triya. *Perbaikan Etika dan Kinerja Anggota DPR, Dosen UGM Desak Reformasi Parlemen secara Sistemik*. UGM - Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/perbaikan-etika-dan-kinerja-anggota-dpr-dosen-ugm-desak-reformasi-parlemen-secara-sistemik/. Diakses 18 Januari 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/47143/uu-no-12-tahun-1980. Diakses 7 Maret 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004. Diakses 8 Maret 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id/details/38643/uu-no-17-tahun-2014. Diakses 13 Mei 2026.

Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun*

2020 tentang Tata Tertib. https://peraturan.bpk.go.id/Details/256012/peraturan-dpr-no-1-tahun-2020. Diakses 24 Februari 2026.

BBC News Indonesia. 2025. *Anggota DPR mendapat dana reses Rp2,5 miliar tiap tahun, dari mana asalnya?*. YouTube. https://youtu.be/d6C5pdBdEgA. Diakses 30 Mei 2026.

Bestari, Novina Putri. *Tuntutan Rakyat 17+8 Viral di Media Sosial, Begini Isinya*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250901082334-37-663072/tuntutan-rakyat-17-8-viral-di-media-sosial-begini-isinya. Diakses 18 Januari 2026.

Constitution of Iceland (Draft Constitution 2011). https://www.constituteproject.org/constitution/Iceland_2011D. Diakses 10 Juni 2026.

Constitution of the Kingdom of Norway (2014). https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2014. Diakses 10 Juni 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Tugas, Wewenang, dan Hak DPR*. https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/tugas-wewenang-hak. Diakses 06 Maret 2026.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Saksi Ahli Hukum Keuangan Negara*. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manna/id/data-publikasi/berita-terbaru/3125-saksi-ahli-hukum-keuangan-negara.html. Diakses 7 Maret 2026.

Fazli, Achmad Zulfikar. *Muhaimin: Alokasi APBN untuk Perlindungan Sosial Tembus Rp508,2 Triliun*. Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/read/bVDCPyl0-muhaimin-alokasi-apbn-untuk-perlindungan-sosial-tembus-rp508-2-triliun. Diakses 10 Juni 2026.

GoodStats Data. *Tingkat Kepercayaan Publik pada Lembaga Negara 2025*. https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-kepercayaan-publik-pada-lembaga-negara-2025-28pgQ. Diakses 06 Juni 2026.

Hukumonline. *Dana Reses DPR RI Naik Jadi Rp702 Juta, Dasco Beri Penjelasan*. https://www.hukumonline.com/berita/a/dana-reses-dpr-ri-naik-jadi-rp702-juta--dasco-beri-penjelasan-lt68ea035a5f3a8/. Diakses 30 Mei 2026.

Indah, Retno Nur. *Pengawasan Keuangan Negara Agar Terhindar dari Penyimpangan*. DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13960/Pengawasan-Keuangan-Negara-Agar-Terhindar-dari-Penyimpangan.html. Diakses 31 Desember 2025.

Investor Trust. *Survei Indikator: 93% Publik Percaya TNI, Tertinggi di Antara Lembaga Negara*. https://investortrust.id/business/93935/survei-indikator-93-publik-percaya-tni-tertinggi-di-antara-lembaga-negara. Diakses 06 Juni 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran*

Kementerian Negara/Lembaga. https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/7e942200-9743-4d5d-a7a7-902e41ecd139/2026pmkeuangan003.pdf. Diakses 12 Mei 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/19110cc5-3b4e-47c3-79a8-08db7d39e63c. Diakses 12 Mei 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Ruang Lingkup Kegiatan Kementerian Keuangan*. e-PPID Kementerian Keuangan RI. https://e-ppid.kemenkeu.go.id/in/page/ruanglingkupkegiatan. Diakses 7 Maret 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. *DPR Sahkan UU APBN 2026, Diarahkan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkeadilan*. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/dpr-sahkan-uu-apbn-2026-diarahkan-untuk-pertumbuhan-yang-inklusif-dan-berkeadilan. Diakses 30 Mei 2026.

Kompas.com. *Survei Indikator: TNI Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik*. https://nasional.kompas.com/read/2026/02/08/17405461/survei-indikator-tni-jadi-lembaga-paling-dipercaya-publik?page=all#page2. Diakses 06 Juni 2026.

Kontan. *Bayar Gaji dan Tunjangan, Anggaran DPR Melonjak Jadi Rp 9,9 Triliun di 2026*. https://nasional.kontan.co.id/news/bayar-gaji-dan-tunjangan-anggaran-dpr-melonjak-jadi-rp-99-triliun-di-2026. Diakses 30 Mei 2026.

Kumparan Bisnis. *Populer: Anggaran DPR Naik Jadi Rp 9,9 T; Eks Wasekjen Gerindra Komisaris WSKT*. https://kumparan.com/kumparanbisnis/populer-anggaran-dpr-naik-jadi-rp-9-9-t-eks-wasekjen-gerindra-komisaris-wskt-25hULIu8SXa/2. Diakses 24 Mei 2026.

Mahkamah Konstitusi RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan Keempat)*. https://www.mkri.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf. Diakses 10 Juni 2026.

Mahkamah Konstitusi RI. *UU Hak Keuangan Kehilangan Relevansi, Perlu UU Baru*. https://www.mkri.id/berita/uu-hak-keuangan-kehilangan-relevansi,-perlu-uu-baru-24783. Diakses 14 Mei 2026.

Official iNews. 2025. *Fantastis! Segini Gaji & Tunjangan Anggota DPR per Bulan | iNews Pagi (26/8)*. YouTube. https://youtu.be/iqCJ_Yprvis. Diakses 29 Mei 2026.

Reuters. 2025. *Indonesian lawmakers get allowance hike after protests against perks*. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-lawmakers-get-allowance-hike-after-protests-against-perks-2025-10-13/. Diakses 29 Mei 2026.

Simatupang, Estomihi F.P. *Teori Hukum Welfare State*. Beranda Hukum. https://berandahukum.com/a/teori-hukum-welfare-state. Diakses 8 Maret 2026.

South China Morning Post. 2025. *Indonesia nearly doubles key allowance for lawmakers despite public anger, protests*. https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3328784/indonesia-nearly-doubles-key-allowance-lawmakers-despite-public-anger-protests. Diakses 29 Mei 2026.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. *Original Position: The Difference Principle*. https://plato.stanford.edu/entries/original-position/difference-principle.html. Diakses 6 Juni 2026.

Tempo. *Fakta-fakta soal Kenaikan hingga Salah Transfer Dana Reses DPR*. https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-soal-kenaikan-hingga-salah-transfer-dana-reses-dpr-2078772. Diakses 24 Februari 2026.

Tempo. *ICW: Setiap Anggota DPR Dapat Gaji dan Tunjangan Rp 239 Juta Per Bulan*. https://www.tempo.co/hukum/icw-setiap-anggota-dpr-dapat-gaji-dan-tunjangan-rp-239-juta-per-bulan--2063288. Diakses 18 Januari 2026.

Tempo.co. *Penduduk Miskin, BPS Sebut Perbedaan dengan Versi Bank Dunia*. https://www.tempo.co/ekonomi/penduduk-miskin-bps-sebut-perbedaan-dengan-versi-bank-dunia-1334458. Diakses 10 Juni 2026.

Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. *Matriks Perbandingan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014*. https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Matriks-Perbandingan-UU-MD3.pdf. Diakses 02 Januari 2026.

United Nations Development Programme (UNDP). *Human Development Index (HDI)*. https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI. Diakses 10 Juni 2026.

Wardana, Dodi Jaya. *Membaca Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. UMG – Universitas Muhammadiyah Gresik. https://umg.ac.id/opini/membaca-gerakan-178-tuntutan-rakyat-dalam-perspektif-hukum-administrasi-negara. Diakses 18 Januari 2026.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182).

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 92).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472).